**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP
AKTA IN ORIGINALI**
***PUBLIC NOTARY LEGAL RESPONSIBILITIES ON ORIGINAL
DEEDS***

Putra Arifaid

Magister Kenotariatan Universitas Mataram

Email : putra_arifaid@yahoo.com

Naskah diterima : 09/06/2017; direvisi : 13/12/2017; disetujui : 28/12/2017

Abstract

The purpose of this research is to analyze and answer the problems on the theoretical basis of the original certificate and the legal responsibility of the Notary to the deed in origin which is not required to be deposited as a part of the Notary protocol. This study is qualified as a normative legal research that departs from the conflict of norms. The results of this study indicate that First: Theoretical basis of the original certificate that the original certificate is based on the legal opinion of the experts stating that the original certificate is not required to be deposited, in practice Notary sometimes makes a deed minute and deposited it as State archive (Notary's protocol). Second: The legal responsibility of a Notary in every deed is an absolute responsibility, so that if unexpected thing happens then the Notary may ask to responsible if in the making of the deed contains legal defect element, otherwise if in making the deed does not cause harm to The parties then the Notary can not be prosecuted either administratively or in civil area.

Keywords : Original Deeds, Responsibilities, Public Notary

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah berupaya menganalisis dan menjawab permasalahan mengenai landasan teoritis akta in originali dan tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta in originali yang tidak wajib disimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang berangkat dari pertentangan norma.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* : pendapat ahli menyatakan bahwa akta in originali tidak wajib disimpan minuta aktanya, dalam praktek Notaris terkadang membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai arsip Negara (protokol Notaris). *Kedua*: Tanggung jawab hukum Notaris dalam setiap membuat akta merupakan tanggung jawab mutlak, sehingga jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban jika dalam pembuatan akta tersebut mengandung unsur cacat hukum, namun sebaliknya jika dalam pembuatan akta tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak maka Notaris tidak dapat dituntut baik secara administratif maupun secara perdata.

Kata Kunci : Akta in originali, Tanggung Jawab, Notaris

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini kebutuhan akan jasa Notaris kian hari kian meningkat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang bersifat Hukum Privat (Perdata). Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak itu sendiri dan untuk lebih mengikat perbuatan hukum tersebut biasanya para pihak membuat suatu perjanjian dalam akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu Notaris. Akta Notaris adalah merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UUJN).

Dalam menjalankan suatu tugas dan kewenangannya yaitu di dalam membuat suatu akta autentik, maka Notaris wajib menyimpan minuta aktanya. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan dokumen Negara yang wajib disimpan dan dirahasiakan. Akta yang disimpan oleh Notaris adalah merupakan minuta akta. Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.¹

Dalam pembuatan akta autentik harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu :

1. Akta tersebut harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum;
2. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan didalam undang-undang;
3. Pejabat umum yang membuat akta harus mempunyai kewenangan untuk membuat

akta tersebut, baik kewenangan berdasarkan daerah (wilayah) kerjanya atau waktu pada saat akta tersebut dibuat.

4. Sifat tertulis suatu perjanjian yang dituangkan dalam sebuah akta tidak membuat sahny suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari, karena suatu perjanjian harus dapat memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.²

Notaris dituntut untuk memiliki rasa kepekaan atas nilai keadilan dan kebenaran serta mewujudkan kepastian hukum bagi pencapaian dan pemeliharaan ketertiban masyarakat yang membutuhkan jasanya. Selain itu, Notaris itu berkewajiban selalu mengusahakan dengan penuh kesadaran yang bermoral untuk mengetahui segala aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. Secara ilmiah bagi tegaknya hukum dan keadilan dan terutama diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkannya.

Undang-Undang menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya (Pasal 1 ayat (1) UUJN). Lebih lanjut di dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam

¹ Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm.3.

² I. Gusti Bagus Yoga Prawira. "Responsibility Of The Conveyancer Against Selling Land Deed. Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan) Volume 4 Nomor 1 Tahun 2016, Hlm. 66

akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Dalam Pasal tersebut di atas seorang Notaris dalam membuat suatu akta autentik wajib menyimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris, namun yang menarik perhatian penulis dalam penelitian ini adalah bahwa Notaris dalam membuat suatu akta tertentu tidak wajib atau tidak diharuskan untuk menyimpan minuta aktanya, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi “kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta In Originali.” Akta In Originali adalah akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan.

Sehingga menurut penulis ada pertentangan norma (konflik norma) yang mengatur mengenai hal ini, karena di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan “membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris”. Sedangkan di dalam Pasal 16 ayat (2) menyebutkan “kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali”. Kedua Pasal ini sangat bertolak belakang, disatu sisi Notaris diwajibkan untuk menyimpan minuta aktanya, tetapi disisi lain Notaris tidak diwajibkan untuk menyimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dalam penelitian ini mengangkat topik yang berjudul **“Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali”**. Guna membatasi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan-permasalahan terbatas pada : (1). Apa yang menjadi landasan teoritis akta in originali tidak wajib disimpan minuta aktanya oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris ? dan (2). Bagaimanakah tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta in originali yang tidak wajib disimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum serta sejarah hukum. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan (undang-undang), terutama pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris. pendekatan konseptual (*conceptualical approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, maka penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum serta asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani. pendekatan historis (*historical approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang

diteliti dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang sedang ditangani.³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan (dokumen), yaitu dengan cara melihat, mengamati, membaca, mencatat, dan mendengarkan maupun melakukan penelusuran melalui media internet. Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Analisis Preskriptif, yaitu sifat analisis yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh Peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.⁴

PEMBAHASAN

Landasan Teoritis Akta In Originali Yang tidak Disimpan Minuta Aktanya sebagai Bagian dari Protokol Notaris

Akta ini originali merupakan asli akta yang dikeluarkan oleh Notaris, kemudian diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini Notaris tidak diwajibkan untuk membuat grosse akta, salinan akta ataupun kutipan akta. Yang dimaksud dengan Akta In Originali adalah akta yang dibuat oleh Notaris dengan menyerahkan aslinya kepada pihak yang bersangkutan. Pada dasarnya, yang dibuat dimuka dan dihadapan Notaris, yaitu minuta aktanya yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris dan disimpan oleh Notaris, namun ada kalanya

minuta aktanya diserahkan kepada para pihak. Akta yang minuta aktanya diserahkan kepada para pihak disebut dengan akta in originali, yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *deed in originali*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *akte in originali*.⁵

Akta In Originali adalah merupakan surat tanda bukti yang dibuat oleh Notaris yang memuat tentang penandatanganan akta oleh pihak yang bersangkutan, tandatangan para saksi dan juga tandatangan dari Notaris sendiri. Setelah semua ditandatangani maka asli akta tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Dari penelitian ini ada beberapa unsur akta in originali, yaitu meliputi surat tanda bukti, pejabat yang membuatnya (Notaris), ada para pihak yang menandatangani yaitu para pihak yang bersangkutan, saksi dan Notaris, aslinya diserahkan kepada para pihak.

Akta in originali merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, baik berupa akta pejabat maupun akta pihak. Pengertian lain tentang akta in originali dikemukakan oleh Pieter EL, yang menyebutkan akta in originali adalah asli akta yang diberikan kepada yang langsung berkepentingan dalam akta dan akta in originali ini tidak disimpan dalam protokol Notaris, sehingga untuk akta dalam in originali, Notaris tidak dapat mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta”.⁶

Menurut Yudo Diharjo Lantanea, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akta in originali adalah :

“Semua tanda tangan, paraf dan catatan pinggir (renvoi) tercantum dalam akta dan dalam akta in originali tersebut hanya dibuat sebanyak yang dibutuhkan dengan ketentuan pada setiap akta tertulis

³ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-5, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 29.

⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.39.

⁵ Salim, *Op.Cit*, Hlm.153.

⁶ *Ibid*.

kata-kata sebagai berikut “Berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”. Misalnya bila dibuat dalam 5 (lima) rangkap, maka hanya sebanyak itu saja yang diberikan dan Notaris tidak diwajibkan untuk menyimpan (atau mengarsipkan) akta dalam bentuk in originali ke dalam bundel akta Notaris bulanan, meskipun diberi nomor bulanan dan dimasukkan dalam buku daftar Notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium. Pada praktiknya dalam hal para pihak membutuhkan 5 (lima) rangkap, Notaris akan menawarkan untuk membuat 1 (satu) rangkap tambahan untuk disimpan, diarsipkan oleh Notaris sehingga dalam hal dibutuhkan dikemudian hari oleh pihak yang berkepentingan karena satu dan lain hal, maka Notaris tersebut dapat membuat fotokopi terhadap akta ini originali yang disimpan oleh Notaris tersebut, dengan pengecualian dalam hal akta in originali yang diberi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa, hanya dapat dibuat 1 (satu) rangkap”.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengecualikan tentang kewajiban menyimpan minuta akta dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali. Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris berbunyi ”kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku dalam Notaris mengeluarkan akta in originali”. Lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (4) berbunyi”akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata

”BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.

Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali

1. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dari Segi Administratif

Tanggung jawab Notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.⁸

Sedangkan Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu:⁹

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap

⁸ Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 229.

⁹ Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center For Documentation And Studies Of Business Law (CDBL), Yogyakarta, Hlm.98.

⁷ Ibid.

kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;

- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris Dari Segi Perdata

Sebagaimana diketahui bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang, yang menjalankan sebagian dari kekuasaan Negara untuk melayani kepentingan publik (umum). Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa “pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melawan hukum”.¹⁰

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut:¹¹

- a. Melanggar hak orang lain ;

Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.

- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

- c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik;

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak.

- d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Menurut Fockema Andreae, tanggung jawab diartikan sebagai terikat, sehingga tanggung jawab *aansprakelijk* dalam pengertian hukum berarti keterikatan, di dalam kamus Departemen Pendidikan Nasional memberi pengertian terhadap kata tanggung jawab sebagai keadaan wajib menanggung segalanya, kalau ada sesuatu hal

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.¹²

Menurut O.P.Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala yang dilihat daripada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik dan dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.¹³

Sedangkan menurut Purwadi Patrik, mengemukakan bahwa tanggung jawab adalah orang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan di bawah pengawasannya beserta segala akibatnya.¹⁴ Notaris yang diduga atau telah dinyatakan bersalah secara administrasi terhadap akta yang telah dibuatnya dapat dikenakan sanksi administrasi. Di samping sanksi keperdataan yang bisa dijatuhkan kepada Notaris, Sanksi administrasi juga dapat dikenakan kepada Notaris.

Notaris hanya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh kilennya (pihak yang berkepentingan) dan tanggung jawab ini menurut ketentuan dalam Pasal

1365 Perdata yang menentukan apabila :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum (perbuatan melanggar hukum);
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat perbuatan tersebut (hubungan kausal);
- c. Pelaku tersebut bersalah (kesalahan), dan
- d. Norma yang dilanggar mempunyai “*streking*” untuk mengelakkan timbulnya kerugian (relatifitas)”.

3. Tanggung Jawab Notaris dari Segi Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur mengenai ketentuan pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi tersebut dapat berupa sanksi terhadap akta yang dibuatnya dan terhadap Notaris. Sanksi terhadap akta yang dibuatnya menjadikan akta yang dibuat oleh Notaris turun derajatnya dari akta autentik atau menjadi akta di bawah tangan, sedangkan untuk Notaris dapat diberikan sanksi mulai dari teguran hingga berujung pada pemberhentian dengan tidak hormat.

Suatu perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, apabila melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut maka akan diikuti oleh sanksi yang berupa pidana tertentu. Dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris maka sanksi pidana yang dimaksudkan adalah sanksi pidana yang dikenakan jika yang dilakukan oleh Notaris dalam

¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm.1398.

¹³ O.P.Simorangkir, 1998, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, Hlm.102.

¹⁴ Puwadi Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, hlm.8.

kapasitasnya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan merupakan kapasitas pribadi atau individu dari Notaris tersebut sebagai subjek hukum. Menurut Abdul Ghofur Anshori, mengemukakan bahwa:¹⁵

*“Dalam hukum pidana, kelakuan atau tingkah laku itu ada yang bersifat positif dan yang negatif. Di dalam hal kelakuan yang bersifat positif terdakwa berbuat sesuatu, sedangkan dalam hal yang bersifat negatif seseorang tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dilakukan. Adapun yang dimaksud dengan kelakuan adalah sikap jasmani, sebab tidak berbuat sesuatu tidak dapat dimasukkan dalam pengertian tersebut dan yang termasuk dalam pengertian kelakuan tersebut terbatas hanya pada sikap jasmani yang disadari saja.”*¹⁶

Tanggung jawab Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris secara eksplisit disebutkan dalam pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Dalam lapangan hukum keperdataan, sanksi merupakan tindakan hukum untuk memaksa orang untuk menepati perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-Undang.

Setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia selalu ada sanksi pada akhir aturan hukum tersebut. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, banyak sekali Pasal-pasal yang mengatur mengenai sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap Notaris, jika Notaris melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris.

Begitu juga dengan akta in originali, walaupun asli akta tersebut telah diserahkan semua kepada pihak yang berkepentingan, Notaris tetap bertanggung jawab terhadap setia akta yang dikeluarkannya. Notaris dalam menjalankan tugasnya adalah menjalankan sebagian dari tugas Negara atau pemerintahan khususnya dalam bidang keperdataan terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Menurut HD.Stout mengatakan bahwa “wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atauran-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.¹⁷

Dari pandangan ini penulis berpendapat bahwa Notaris adalah merupakan subjek hukum publik dalam melayani hubungan hukum publik. Dalam kaitan dengan akta in originali yang dikeluarkan oleh Notaris adalah merupakan bagian dari hubungan hukum publik di mana Notaris dapat membuat akta dalam bentuk akta in originali dan menyerahkan semua asli

¹⁵ Moeljatno Dalam Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, Hlm 38-39.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ HD.Stout Dalam Ridwan HR, 2006, *Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.98.

akta tersebut berdasarkan kemauan pihak yang berkepentingan.

Menurut P.Nicolai bahwa kewenangan adalah :

“kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”.¹⁸

Menurut Sarkawi “Secara yuridis, pengertian kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum.”¹⁹ Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (Konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.²⁰

Menurut Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani bahwa “kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.”²¹ Oleh karenanya menurut penulis bahwa

pekerjaan Notaris adalah merupakan pekerjaan yang disandang seseorang di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang untuk melayani publik atau hukum publik.

Dalam pembuatan akta in originali, Notaris dituntut untuk selalu berhati-hati dalam pembuatannya karena akta yang dibuat dalam in originali akan diserahkan semua asli aktanya kepada pihak yang bersangkutan. Jika para pihak yang berkepentingan menghendaki bahwa akta in originali tidak dibacakan oleh Notaris dihadapan para pihak, maka Notaris harus mencantumkan diakhir akta in originali tersebut bahwa para pihak yang bersangkutan menghendaki akta tersebut tidak dibacakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keautentikan akta sehingga akta in originali tidak tergedradasi menjadi akta di bawah tangan.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan, Pertama bahwa landasan teoritis tidak disimpannya minuta akta in originali sebagai bagian dari protokol Notaris, yaitu di dasarkan pada beberapa pendapat, yaitu diantaranya Pieter EL, menyebutkan bahwa akta in originali adalah Asli akta yang diberikan kepada yang langsung berkepentingan dalam akta dan akta in originali ini tidak disimpan dalam protokol Notaris, sehingga untuk akta dalam in originali, Notaris tidak dapat mengeluarkan salinan akta, kutipan akta dan grosse akta. Selain itu di dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa “kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Sarkawi, 2015, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Bangsa, Mataram, Cetakan Kedua, 2015.

²⁰ Ibid, Hlm.146.

²¹ Salim, HS Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2014, Hlm. 183.

(1) huruf b tidak berlaku dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali”.

Kedua, Tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggung jawab mutlak, dan tanggung jawab hukum Notaris terhadap akta in originali yang tidak disimpan minuta aktanya sebagai bagian dari protokol Notaris adalah melekat pada diri Notaris, dalam kode etik Notaris telah menentukan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris, berkewajiban menjalankan jabatannya terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali dengan alasan-alasan yang sah. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris, tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Begitu juga dengan akta in originali yang telah diserahkan semua aslinya kepada pihak yang bersangkutan, Notaris tetap bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi dikemudian hari terhadap akta in originali tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika) ,Yogyakarta:UII Press
- Adjie Habib, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ketiga, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Nico, 2003, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDBL), Yogyakarta

O.P.Simorangkir, 1998, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta

PetPeter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum Nomatif*, Cetakan ke-5, Prenada Media Group, Jakarta.

Puwadi Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang

Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ridwan HR. Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2012, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta

Salim, HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta Ketiga, 2014.

Sarkawi, *Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Bangsa, Mataram, Cetakan Kedua, 2015.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- I. Gusti Bagus Yoga Prawira, *Responsibility Of The Conveyancer Against Selling Land Deed*, Jurnal IUS (Kajian

Hukum dan Keadilan) Volume 4
Nomor 1 Tahun 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Jabatan Notaris